

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank

a. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang - Undang RI No. 10 tahun 1998, yang mendefinisikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut PSAK Nomor 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (1999), Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 pengertian bank, Bank adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai

investasi perusahaan. Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dan dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain, bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini dikenal dengan istilah *spread based* (Kasmir, 2008).

b. Fungsi Bank

Tiga fungsi utama bank yaitu:

- 1) Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- 2) Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
- 3) Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

c. Jenis-jenis Bank:

- 1) Dilihat dari fungsinya:
 - a) Bank sentral

Bank sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada di suatu negara.

Contoh: Bank Indonesia, Bank of China, Bank of Japan, Bank of England, dan lain-lain.

b) Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh: BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BTN, BCA, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Swadesi, Bank Permata dan Bank Panin.

c) BPR

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Dilihat dari kepemilikannya:

a) Bank milik negara.

Bank milik negara adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya dibawah UU tersendiri. Contoh: BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Bukopin.

b) Bank swasta nasional.

Bank swasta nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga sehingga keuntungannya akan dinikmati oleh swasta. Contoh: BCA, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Swadesi, Bank Permata, Bank Panin dan lain-lain.

c) Bank koperasi

Bank koperasi merupakan bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Contoh: Bank umum Koperasi Indonesia

d) Bank asing

Bank asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah/swasta asing. Contoh: Citibank, HSBC, ABN Amro, Rabobank, Commenwealt, Bank ANZ, dan lain-lain.

e) Bank campuran

Bank campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh: Bank UOB Buana, Bank Hanvit Indonesia, ANZ Panin Bank, Bank OCB NISP, Bank DSB Indonesia dan lain-lain.

f) Bank Pembangunan Daerah

Bank Pembangunan Daerah bukanlah satu kategori atau jenis bank tersendiri, tetapi masuk dalam kategori Bank Umum. Disebut sebagai Bank Pembangunan Daerah karena memang

Bank Pembangunan Daerah ditujukan sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi untuk turut mendukung program kerja Pemerintah Provinsi yang membutuhkan layanan jasa keuangan dan perbankan. Bank Pembangunan Daerah Adalah bank-bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Bank milik Pemerintah Daerah yang umum dikenal adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang didirikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962. Masing-masing Pemerintah Daerah telah memiliki BPD sendiri. Di samping itu beberapa Pemerintah Daerah memiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Berikut daftar Bank Pembangunan Daerah di Indonesia

1. Bank Aceh
2. Bank DKI
3. Bank Lampung
4. Bank Kalimantan Tengah
5. BPD Jambi
6. BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat
7. BPD Riau Dan Kepulauan Riau
8. BPD Sumatera Barat
9. Bank Jabar Banten, Tbk (BJB)
10. BPD Maluku
11. BPD Bengkulu
12. Bank Jateng (dahulu bernama BPD Jawa Tengah)

13. Bank Jatim (dahulu bernama BPD Jawa Timur)
14. BPD Kalimantan Barat
15. BPD Nusa Tenggara Barat
16. BPD Nusa Tenggara Timur
17. BPD Sulawesi Tengah
18. BPD Sulawesi Utara
19. BPD Bali
20. BPD Kalimantan Selatan
21. BPD Papua
22. BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung
23. BPD Sumatera Utara
24. BPD Sulawesi Tenggara
25. BPD Yogyakarta
26. BPD Kalimantan Timur

Bank pembangunan daerah pada umumnya sama dengan bank pemerintah milik negara. Bank pembangunan daerah berperan sebagai pemegang kas pemerintah daerah. Lapangan usaha utamanya adalah menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha pembangunan di daerah dalam rangka pembangunan nasional, dengan cara :

1. Memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaharuan proyek pembangunan daerah di daerah yang bersangkutan

2. Memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaharuan perusahaan swasta yang merupakan proyek pembangunan daerah dengan persetujuan menteri urusan bank indonesia.
3. Untuk kredit yang ditentukan oleh pemerintah daerah, bank bertindak sebagai penyalur kredit untuk proyek pemerintah daerah.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta. Diantara fungsi bank daerah ialah :

1. Pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat
 2. Menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah
 3. Menghimpun dana
 4. Melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang atau penyimpanan kas daerah)
- 3) Dilihat dari statusnya:
- a) Bank devisa.

Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke LN dan atau transaksi yang berhubungan dengan valas. Contoh: BCA, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Panin, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin dan BTN.

b) Bank non devisa.

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa.

4) Dilihat dari cara menentukan harga:

a) Bank konvensional.

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Contoh: BCA, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Panin, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin dan BTN.

b) Bank syariah.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga. Contoh: Bank Muamalat, BNI Syariah, BSM, BRI Syariah dan lain-lain.

d. Sumber Dana Bank

Menurut Sinungan dalam Lukman Dendawijaya (2005: 46) dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:

1) Dana Pihak Kesatu

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham.

2) Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah dana pinjaman dari pihak luar. Seperti pinjaman dari bank lain (bank dalam negeri maupun luar negeri) atau juga dari lembaga keuangan bukan bank.

3) Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Seperti simpanan giro, tabungan dan deposito.

2. Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006: 51).

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2012: 465) Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, bank pemerintah (melalui Bank Indonesia) dan pengguna jasa bank. Dengan diketahuinya kondisi suatu

bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Bagi perbankan, hasil penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan kebijakan dan implementasi strategi pengawasan, agar pada waktu yang ditetapkan bank dapat menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang tepat.

3. Ketahanan Bank

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ketahanan yang berdasar dari kata tahan memiliki arti tetap keadaannya (kedudukannya dan sebagainya) meskipun mengalami berbagai-bagai hal, tidak lekas rusak (berubah, kalah, luntur, dan sebagainya), kuat atau sanggup menderita (menanggung) sesuatu, dapat menyabarkan (menguasai) diri. Sedangkan ketahanan memiliki arti tahan (kuat); kekuatan (hati, fisik), dan atau daya tahan. Oleh karena itu ketahanan perbankan dapat diartikan sebagai kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan sistem perbankan dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan sistem perbankan.

Menurut Berry *et al* (2015), mendefinisikan bahwa ketahanan dalam sektor perbankan merupakan suatu kondisi dimana individual bank mampu menahan guncangan dari berbagai sumber, baik dari internal

perbankan maupun dari eksternal perbankan. Ketika timbul gejala guncangan, maka perbankan akan mampu menyesuaikan atau menyerap risiko atau merespon dengan cepat setiap guncangan yang muncul, sehingga perbankan mampu mengantisipasi secara dini berbagai potensi guncangan yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Di sisi lainnya, Bank Indonesia (2010) menjelaskan bahwa mengingat pentingnya ketahanan sektor perbankan bagi Indonesia dikarenakan sektor ini menjadi salah satu sektor utama yang berperan dalam menjalankan perekonomian Indonesia dan mayoritas pangsa pasar lembaga keuangan di Indonesia didominasi oleh sektor perbankan. Peningkatan ketahanan sistem perbankan melalui penguatan pengaturan, pemantapan sistem pengawasan bank, penataan kembali tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia, serta pendalaman pasar keuangan.

Ketahanan perbankan dapat ditinjau dari beberapa aspek, yang salah satunya dengan melihat dari kualitas penyaluran dana yang dilakukan oleh bank. Penyaluran dana yang dikelola oleh bank kepada masyarakat akan dikembalikan lagi dengan jangka waktu tertentu dan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh bank. Ketahanan bank dari sisi penyaluran dananya bisa dilihat dari besarnya persentase *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional atau *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah. Ketika terjadi penyaluran dana oleh bank kepada masyarakat, maka kemungkinan di masa yang akan datang muncul kredit/pembiayaan bermasalah.

Dalam memberikan kredit maupun pembiayaan kepada masyarakat, bank harus mampu menilai kelayakan nasabahnya secara tepat. Apabila nasabah yang menerima dana tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam mengembalikan dana tersebut dengan baik, misalnya pembayaran yang tidak tepat waktu hingga bisa dikatakan masuk ke dalam kategori macet, maka akan mengakibatkan NPL/NPF bank mengalami kenaikan. Terutama jika penyaluran dana bank pada saat yang sama tidak mampu dilakukan secara maksimal karena bank kekurangan likuiditas ataupun minimnya modal bank.

4. Kerentanan

a. Kerentanan Ekonomi

Resiko terjadinya krisis yang terus berulang sebenarnya telah disadari bersama sehingga perlu ada kesadaran untuk mengelola arsitektur keuangan internasional yang lebih baik. Banyak negara yang menyadari perlunya kerjasama antar negara, terutama negara-negara besar yang memiliki pengaruh kuat, dalam mengelola kebijakan ekonomi makro. Negara-negara berkembang, atau lebih di kenal sebagai negara emerging countries, biasanya lebih mudah terkena dampak terhadap berbagai perubahan kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis besar seperti terjadi pada tahun 1998 dan 2008, menunjukkan Indonesia sangat rentan terhadap berbagai guncangan global (Haryanto dkk 2018).

Menurut World Bank Institute (2012) kerentanan sebagai peluang atau risiko menjadi miskin atau jatuh menjadi lebih miskin pada waktu mendatang. Menurut Adger (2004) dan Briguglio (2008) pengertian kerentanan belum ada arti yang tepat namun secara umum, kerentanan merujuk kepada potensi kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh guncangan eksogen. Menurut Guilaumon (2007) mendefinisikan kerentanan ekonomi dari sebuah negara dengan risiko kehancuran ekonomi ekonomi (terhentinya pembangunan ekonomi) yang di hadapi negara di sebabkan oleh guncangan eksogen.

Kerentanan ekonomi (*economic vulnerability*) didefinisikan sebagai eksposur suatu perekonomian terhadap guncangan yang bersifat eksogen, yang muncul dari karakter inherent perekonomian itu. Definisi ini diberikan oleh Briguglio et al (2004) dalam makalahnya, yakni "Economic Vulnerability and Resilience Concepts and Measurements", yang dimuat di WIDER Research Paper pada Mei 2008. Tambunan (2012), menyebutkan bahwa ada sejumlah alasan mengapa perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis krisis (krisis produksi, krisis perbankan, krisis nilai tukar, krisis perdagangan, dan krisis modal) diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Perekonomian Indonesia semakin terbuka jika dibandingkan dengan awal Pemerintahan Orde Baru (1966). Reformasi ekonomi khususnya dibidang perdagangan dan keuangan, sebagaimana desakan IMF pasca krisis ekonomi, telah mendorong Indonesia menuju liberalisasi dalam

sektor perdagangan, perbankan dan investasi. Kondisi ini telah mengakibatkan perekonomian Indonesia terintegrasi dengan perekonomian dunia. Konsekuensinya, Indonesia semakin rentan terhadap berbagai guncangan perekonomian dunia. Sebagai terjadi krisis di sector keuangan, Indonesia juga rentan terkena dampaknya karena Indonesia telah lama menjadi tujuan investasi jangka pendek di sector keuangan. Ketika terjadi pembalikan arus modal secara tiba-tiba, dapat mengakibatkan depresiasi mata uang Rupiah yang sangat dalam serta dapat memicu krisis sebagaimana tahun 1998.

- 2) Walaupun dengan laju yang menurun, Indonesia masih bergantung terhadap ekspor dari bahan komoditi primer, seperti pertambangan dan pertanian. Konsekuensinya. Setiap ketidakstabilan permintaan dunia atau guncangan harga terhadap komoditas tersebut khususnya komoditas pertanian akan menjadi guncangan yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Apalagi sektor pertanian saat ini merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, sehingga guncangan harga komoditas pertanian akan secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat petani.
- 3) Dalam dua dekade terkahir, Indonesia semakin tergantung pada impor dari sejumlah produk makanan penting, diantaranya gandum, beras, jagung, daging, sayuran, buah-buahan dan minyak. Konsekuensi dari ketergantungan impor ini adalah kenaikan atau ketidakstabilan dari harga makan tersebut di negara asal, jelas akan mempunyai efek

negatif yang signifikan tidak hanya terhadap pengeluaran minimum rumah tangga tetapi juga akan mengancam keamanan ketahanan pangan di dalam negeri yang bisa berujung pada kerusuhan sosial dan kejatuhan kabinet yang berkuasa.

- 4) Dalam 20 tahun terakhir semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Bahkan semakin banyak desa di Indonesia yang kehidupan masyarakat atau pembangunan ekonominya bergantung pada pengiriman uang dari TKI di luar negeri. Konsekuensinya, pada saat tuan rumah di mana TKI bekerja mengalami krisis, maka akan memaksa TKI untuk berhenti bekerja, akhirnya dipulangkan dan ujungnya angka kemiskinan di desa akan semakin bertambah.
- 5) Sebagai sebuah negara dengan populasi yang besar, yang artinya konsumsi makanan domestic sangat tinggi, akselerasi pertumbuhan output di sektor pertanian di dalam negeri juga sangat krusial, dan ini bergantung pada beragam faktor seperti faktor cuaca. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera besar yaitu Pasifik dan India, maka Indonesia sangat rentan terhadap perubahan udara yang tidak normal, seperti fenomena el-nino yang sering mengakibatkan gagal panen. Jika yang terjadi pada padi, maka akibatnya bisa menjadi serius. Bukan saja ketahanan pangan yang terancam, tetapi juga dapat berakibat terhadap inflasi yang sangat tinggi (hyperinflasi) dan krisis

keuangan karena harus mengimpor beras dalam jumlah yang sangat banyak untuk dibagikan kepada masyarakat miskin.

Sedangkan Nasution (2018), memetakan sumber kerentanan sebagai pemicu gejolak perekonomian dunia yang dapat berujung menjadi krisis menjadi 5 sumber yaitu: (1) Peningkatan tingkat suku bunga internasional; (2) Peningkatan laju inflasi dunia; (3) Tingginya tingkat utang dunia usaha dan perorangan ataupun pemerintah di sejumlah negara; (4) Kebijakan perdagangan AS yang proteksionis; dan (5) Dampak penurunan tarif pajak pendapatan di AS.

b. Kerentanan Perbankan

Teori yang mendasari kerentanan perbankan di sisi liabilitas adalah teori Prisoners' Dilemma. Seperti diketahui hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menyebabkan penarikan dana serentak dan seketika (rush atau run). Mekanisme perilaku yang mendasari fenomena ini misalnya diteliti oleh Diamond dan Dybvig (1983). Kerentanan bank pada dasarnya terjadi karena adanya interaksi antara liquid liabilities yang pada umumnya berjangka waktu pendek dan illiquid assets yang pada umumnya berjangka waktu panjang.

Menurut Hadad dkk (2003) bank sangat mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, karena mereka adalah bagian dari sistem pembiayaan. Lebih jauh perbankan sangat mudah goyah karena; (1) jumlah uang kas sangat kecil dibandingkan dengan kewajibannya segeranya; (2) modal bank sangat rendah dibandingkan dengan kewajibannya dan (3) rasio

dana pihak ketiga berjangka pendek sangat besar. Hampir sama dengan Hadad et al (2003), De Bant et al (2010) menyebut ada tiga faktor yang membuat bank rentan terhadap krisis: (1) struktur dari neraca- masalah perebedaan maturitas aset dan kewajiban; (2) adanya jaringan keterkaitan yang kompleks dari exposure antar bank; (3) informasi dan intensitas kontrol dari transaksi kontrak keuangan, dimana kontrak ini tergantung dari janji bayar (promise) yang diberikan oleh bank peminjam dan harapan untuk menerima pembayaran tersebut.

Kerentanan perbankan dapat di jelaskan situasi dimana kinerja perbankan secara potensial dilemahkan atau diperburuk oleh fluktuasi dari harga aset keuangan dan/ atau ketidakmampuan lembaga perbankan menjalankan fungsi intermediaries-nya sesuai kewajiban kontraktualnya (Intan Afriadi Dkk 2007). Menurut (Pompella, 2016) kerentanan sistem perbankan merupakan konsekuensi dari kurangnya modal secara umum, dan lebih lagi, kurangnya penyangga modal "darurat". Menurut (Bernanke, 2013 dalam Harun et al., 2015) Kerentanan atau vulnerability diasosiasikan sebagai kondisi (*preexisting feature*) sistem keuangan yang bisa memperkuat (*amplify*) dan mempercepat penyebaran shock. Menurut (Harun et al., 2015) Kerentanan atau vulnerability merupakan suatu karakteristik elemen pada sistem keuangan yang berupa simpul rawan yang mengamplifikasikan dan mempropagasi shock awal yang akan memperbesar shock pada sistem keuangan.

Terdapat dua jenis vulnerability dalam sistem keuangan yakni vulnerability yang merupakan karakteristik dasar setiap elemen sistem keuangan (*cumulative behavior*), seperti penyaluran kredit yang secara terus menerus terkonsentrasi pada sektor tertentu. Secara umum identifikasi vulnerability dilakukan melalui risk profiling atas perilaku elemen setiap elemen dalam sistem keuangan yaitu dengan mengukur kinerja dan risiko elemen-elemen tersebut. Identifikasi vulnerability mencakup dimensi time series dan cross section dengan menggunakan pendekatan risiko dalam sistem keuangan yaitu risiko kredit, likuiditas, dan operasional. Identifikasi vulnerability melalui pendekatan risiko kredit merefleksikan risiko yang muncul dari fungsi intermediasi sistem keuangan.

5. Risiko

Sejatinya, risiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari urusan pribadi sampai perusahaan, dari urusan gaya hidup sampai pola penyakit, dari bangun sampai tidur malam, dan masih banyak lagi. Para pakar manajemen risiko di dalam dan luar negeri memiliki banyak definisi mengenai apa itu risiko dan manajemen risiko. Namun demikian, secara umum risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misalnya risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, atau risiko adalah bagi analisis investasi dan, risiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan. Apapun definisi risiko, setidaknya mencakup dua

aspek penting, yaitu aspek probabilitas/kemungkinan dan aspek kerugian/dampak.

Menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 Pengertian risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian bank. risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, dimana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan.

Berdasarkan bahasa, menurut kamus besar bahasa Indonesia Risiko mempunyai makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau berbagai definisi. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan menurut kamus ekonomi, Risiko adalah kemungkinan mengalami kerugian atau kegagalan karena tindakan atau peristiwa tertentu.

Menurut Philip Best (2004) menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan.

Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarman A. Karim (2004) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Dari definisi-definisi tersebut, risiko memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
2. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian

Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Eksekutif dalam manajemen bank serta seluruh pihak terkait harus mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha bank, serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko tersebut muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat. Pemahaman umum mengenai masing-masing kategori risiko sangat penting sehingga para manajer, pelaksana (*risk taker*), bagian pengawasan dapat berdiskusi tentang masalah-masalah umum yang secara alam terjadi dari berbagai eksposur risiko. Risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan, namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba yang atraktif.

Agar manfaat tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan harus mengerti tentang risiko dan pengelolaannya

6. Risiko Perbankan

Perbankan adalah lembaga yang paling begitu rentan dengan risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan uang (*money*). Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti penyaluran kredit, penertiban kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Risiko yang dialami perbankan menjadi suatu yang kompleks dan telah banyak menyebabkan perbankan mengalami masalah khususnya perbankan swasta nasional. Pada prinsipnya pemerintah dalam hal ini menteri keuangan dan Bank Indonesia saling bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda dunia perbankan di Indonesia, termasuk menghindari dampak lebih jauh terjadinya kebangkrutan bahkan bisa menimbulkan risiko sistematis.

Dalam hal menghindari risiko perbankan ada 4 (empat) risiko perbankan yang ditetapkan atau yang disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk dimanage (dikelola) yaitu :

a). Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitor dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana

yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur. Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang dtimbulkan oleh kredit tersebut.

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Bank sangat memperhatikan risiko ini, mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utamanya. Saat ini, sejarah menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat. Bad debt atau piutang tak tertagih atau disebut juga dengan piutang raguragu, semakin besar *bad debt* maka semakin besar kerugian yang akan ditanggung oleh suatu lembaga perbankan, dengan kata lain suatu perbankan berusaha kuat untuk mengurangi *bad debt*. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing financing* (NPF).

Dari perspektif bank, terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank.

a) Kebijakan perkreditan yang ekspansif

Bank yang memiliki kelebihan dana sering menetapkan kebijakan perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan kredit secara wajar, yaitu dengan menetapkan sejumlah target kredit yang harus dicapai untuk kurun waktu tertentu. Keharusan pencapaian target kredit dalam waktu tertentu tersebut cenderung mendorong pejabat kredit menempuh langkah-langkah yang lebih agresif dalam penyaluran kredit sehingga mengakibatkan tidak lagi selektif dalam memilih calon debitur dan kurang menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dalam menilai permohonan kredit sebagaimana seharusnya. Di samping itu, bank sering saling membajak nasabah dengan memberikan kemudahan yang berlebihan. Bank dalam beberapa kasus sering mengabaikan kalau calon debiturnya masuk dalam Daftar Kredit Macet yang diterbitkan Bank Indonesia secara rutin.

b) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan

Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara dalam suatu bank. Hal yang sering terjadi, bank

tidak mewajibkan calon debitur membuat studi kelayakan dan menyampaikan data keuangan yang lengkap. Penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan tersebut bisa disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang menangani masalah perkreditan belum memadai. Di samping itu, salahsatu penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut dari sisi intern bank adalah adanya pihak dalam bank yang sangat dominan dalam pemutusan kredit.

c) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit bank dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta dari debitur tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas perkreditan tidak lengkap dan tidak teratur, pemantauan terhadap usaha debitur tidak dilakukan secara rutin, termasuk peninjauan langsung pada lokasi usaha debitur secara periodik. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan tersebut menyebabkan kredit yang secara potensial akan mengalami masalah tidak dapat dilacak secara dini, sehingga bank terlambat melakukan langkah-langkah pencegahan.

d) Lemahnya informasi kredit

Sistem informasi yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya akan memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya sulit melakukan deteksi dini. Hal tersebut dapat

menyebabkan terlambatnya pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

e) Itikad kurang baik dari pihak bank

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan banyaknya untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan terutama legal lending limit. Skenario lain adalah pemilik dan atau pengurus bank memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya fiktif. Padahal kredit tersebut digunakan untuk tujuan lain. Skenario ini terjadi karena adanya kerja sama antara pemilik dan pengurus bank yang memiliki itikad kurang baik.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini sangat terkait dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain terdiri dari:

a) Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit

Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan penyejukan ekonomi atau akibat kebijakan pengetatan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebabkan tingkat bunga naik dan pada gilirannya debitur tidak lagi mampu membayar cicilan pokok dan bunga kredit.

b) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur

Dalam kondisi persaingan yang tajam, sering bank menjadi tidakrasional dalam pemberian kredit dan akan diperburuk dengan keterbatasan kemampuan teknis dan pengalaman petugas bank dalam pengelolaan kredit.

c). Kegagalan usaha debitur

Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur yang sensitif terhadap pengaruh eksternal, misalnya kegagalan dalam pemasaran produk karena perubahan harga di pasar, adanya perubahan pola konsumen, dan pengaruh perekonomian nasional.

d). Debitur mengalami musibah

Musibah bisa saja terjadi pada debitur, misalnya meninggal dunia, lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha debitur tidak dilindungi dengan asuransi.

b) Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi luar prediksi atau yang tidak normal sehingga kondisi tersebut menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian.

Resiko pasar secara umum disebabkan oleh dua hal.

a. Risiko Nilai Tukar

Adalah risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar mata uang asing dipasaran International sehingga perubahan ini mempengaruhi kepada kondisi yang tidak pasti pada nilai perusahaan

b. Risiko Tingkat Bunga

Adalah risiko yang disebabkan karena berubahnya tingkat suku bunga (*interest rate*) yang menyebabkan suatu perusahaan menghadapi dua tipe risiko selanjutnya yaitu :

- 1) Risiko perubahan pendapatan, dimana perubahan itu menyebabkan berubahnya atau berkurangnya nilai dari yang diharapkan.
- 2) Risiko perubahan nilai pasar yaitu terjadinya penurunan nilainya atau menjadi lebih kecil dari yang semula.

c). Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan resiko yang timbul karena faktor internal bank sendiri yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer human error dan lainnya sehingga kejadiannya seperti itu telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri.

d). Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidak mampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

7. Krisis Perbankan

Hardy dan Pazarbasioglu (1999) mengamati fenomena tentang sektor keuangan dan khususnya tentang krisis sektor perbankan telah banyak menjadi bahan kajian dalam beberapa dekade terakhir. Sektor perbankan menjadi sektor yang menarik banyak kalangan untuk meneliti lebih intens karena industri ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Menurut Hadad et al (2003) terdapat beberapa alasan terkait perlunya industri perbankan mendapatkan perhatian khusus diantaranya, karena industri perbankan memiliki rasio kas terhadap aset yang rendah, rasio modal terhadap aset yang rendah dan rasio dana jangka pendek terhadap total deposit yang tinggi. Ketika sektor ini tidak dimonitoring dengan baik maka dapat menyebabkan krisis dan krisis perbankan ini dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian.

Menurut Reinhart dan Kaminsky (1999), krisis perbankan adalah suatu situasi dimana terjadi bank run yang menyebabkan penutupan, merger dan pengambilalihan oleh sektor publik, serta adanya intervensi pemerintah untuk penyalangan sektor perbankan dalam skala yang besar. Sedangkan menurut Kunt & Detragiache (1998) menjelaskan bahwa krisis perbankan terjadi ketika salah satu kondisi dibawah ini terpenuhi, seperti :

- a. Nilai rasio kredit macet (*Non Performing Loan*) melebihi dari 10 persen dari total aset yang dimiliki perbankan.
- b. Besarnya biaya operasi yang harus di keluarkan untuk penyelamatan sektor perbankan mencapai 2 persen dari GDP suatu negara

- c. Permasalahan dalam sektor perbankan menyebabkan terjadinya nasionalisasi dalam skala besar.
- d. Terjadinya *bank panic* atau terjadi penarikan secara besar-besaran oleh nasabah, akibatnya pemerintah mengambil tindakan darurat untuk menyelamatkan sektor perbankan melalui pembekuan deposito nasabah, atau adanya jaminan deposito umum yang diberlakukan oleh pemerintah dalam menanggapi krisis.

8. Krisis Keuangan

Hardy dan Pazarbasioglu (1999) mengamati fenomena tentang sektor keuangan dan khususnya tentang krisis sektor perbankan telah banyak menjadi bahan kajian dalam beberapa dekade terakhir. Sektor perbankan menjadi sektor yang menarik banyak kalangan untuk meneliti lebih intens karena industri ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Menurut Hadad et al (2003) terdapat beberapa alasan terkait perlunya industri perbankan mendapatkan perhatian khusus diantaranya, karena industri perbankan memiliki rasio kas terhadap aset yang rendah, rasio modal terhadap aset yang rendah dan rasio dana jangka pendek terhadap total deposit yang tinggi. Ketika sektor ini tidak dimonitoring dengan baik maka dapat menyebabkan krisis dan krisis perbankan ini dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian.

9. Penyebab Terjadinya Krisis

Krisis keuangan atau perbankan secara umum pernah terjadi diberbagai negara di dunia. Pemahaman mengenai penyebab terjadinya

krisis masih sangat beragam tergantung dari kondisi negara yang dijadikan kasus. Tetapi apabila diamati secara luas, krisis keuangan atau krisis perbankan memiliki karakteristik atau pola tertentu yang selalu berulang.

Menurut pengamatan McKinnon dan Pill (1994) penyebab terjadinya krisis perbankan karena adanya ketidakaturan aliran modal dalam perekonomian dan sektor perbankan serta asuransi deposito dan masalah *moral hazard*.

Furfine (2001) terdapat tiga alasan terjadinya krisis perbankan dapat terjadi:

- 1). Kualitas aset bank mengalami kekurangan likuiditas. Untuk menambah kekurangan likuiditas ini bank diharapkan dapat menarik cadangannya pada bank sentral.
- 2). Bank yang menghadapi penarikan dana besar-besaran dari masyarakat sehingga memerlukan dana cadangan bank sentral untuk membayar nasabahnya.
- 3). Adanya hambatan karena bank kehilangan akses pasar antar bank, dan pinjaman interbank dibekukan sampai institusi keuangan ataupun pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap risiko pinjaman.

B. Landasan Konsep

1. Aset

a. Pengertian aset

Aset atau aktiva adalah produk bernilai yang dikuasai atau dimiliki suatu perusahaan, baik berupa harta benda (properti), hak atau suatu

tuntutan terhadap aset maupun jasa yang dimiliki. Aset dalam bisnis dan akuntansi merupakan sumber ekonomi yang dimiliki oleh seseorang individu atau sebuah bisnis atau perusahaan. Apapun properti atau barang berharga yang dimiliki, yang biasanya dianggap bisa berguna sebagai pembayaran utang seseorang, biasanya dianggap sebagai satu aset. Aset merupakan benda yang mudah diubah menjadi tunai. Aset merupakan kunci sebuah perusahaan mencatat nilai keuangan aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset merupakan uang dan barang berharga lain milik individu atau bisnis.

Menurut *Weygant, et all (2007:11-12)*, aset adalah sumber penghasilan atas usahanya sendiri dimana karakteristik umum yang dimilikinya yaitu memberikan jasa atau manfaat dimasa yang akan datang.

b. Ciri-ciri aset memiliki tiga fitur utama yaitu:

1. Kemungkinan keuntungan di masa depan yang melibatkan kapasitas, secara tunggal atau kombinasi dengan aset lain, dalam kasus pengusaha berorientasi mencari keuntungan sebesar-besarnya, untuk berkontribusi secara langsung, atau tidak langsung kepada dana tunai, dan, dalam kasus organisasi bukan laba, untuk memberikan layanan.
2. Entitas dapat mengontrol akses ke kebaikan itu.
3. Transaksi atau peristiwa memberi hak kepada entity, atau kontrol, keuntungan yang telah terjadi.

c. Komponen Aset/Aktiva

Dalam melaksanakan operasi perusahaan, aset tetap merupakan salah satu elemen utama yang harus diperhatikan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diinginkan perusahaan. Aset tetap terdiri dari aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap bersifat permanen yakni dapat dipergunakan lebih dari satu tahun atau dari satu siklus akuntansi. Menurut Fees-Warren dalam bukunya Pengantar Akuntansi yang diterjemahkan oleh Aria farahmita, SE,Ak, mendefinisikan aset tetap sebagai berikut: “Aset Tetap adalah aset yang berumur panjang yang sifatnya relatif tetap atau permanen yang dimiliki oleh perusahaan yang dibeli bukan untuk dijual kembali dan digunakan dalam operasi perusahaan.” (2005:492)

1. Pengelompokan Aset Tetap

Dari beberapa aset tetap yang dimiliki perusahaan diantaranya tanah, bangunan, peralatan, mesin dan aset tetap lainnya. Maka aset tetap tersebut dapat dikelompokan sebagai berikut:

- a. Menurut substansinya : gedung, mesin, tanah, dan peralatan (aset berwujud). (Aset tidak berwujud) paten, copyright, dll.
- b. Berdasarkan dapat disusutkan atau tidak

Aset tetap yang dapat disusutkan seperti bangunan, peralatan, mesin, dll. Aset tetap yang tidak dapat disusutkan seperti tanah.

2. Kredit

- a. Pengertian Kredit

Menurut Johanes (2004) kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya atau credo atau creditum yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur.

Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 menyebutkan pengertian kredit, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil tertentu. Kredit juga didefinisikan sebagai penyerahan atas dasar kepercayaan sejumlah uang atau barang yang dipersamakan dan wajib dikembalikan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Adapun menurut *Hasibuan (2007:87)* mengemukakan pengertian kredit yang lebih jelas bahwa: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati". Kemudian *Suyatni, (2002)* memberikan definisi kredit sebagai berikut: Kredit dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu".

Kasmir (2010:102) menyatakan bahwa, semakin banyak kredit yang disalurkan atau diberikan maka akan semakin besar pula perolehan laba

sehingga mampu mempertahankan kelangsungan dan sekaligus memperbesar usaha yang sudah ada (Kasmir, 2010:102).

b. Jenis-jenis kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang dikeluarkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi adalah :

1. Dari Segi Jangka Waktu

a) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi dan palawija.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, dan biasanya kredit ini untuk melakukan investasi.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama, yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun dan biasanya untuk keperluan investasi jangka panjang.

2. Dari Segi Kolektibilitas

a) Kredit lancar (pas)

Adalah kredit yang kriterianya antara lain pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening

yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai.

b) Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)

Adalah kredit yang kriterianya antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan dan didukung oleh pinjaman baru.

c) Kurang Lancar (substandard)

Yang dimaksud kredit kurang lancar adalah kredit yang mempunyai kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari dan dokumen pinjaman lemah.

3. Dari segi jaminan

a) Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi oleh jaminan yang diberikan debitur.

b) Kredit Tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan ataupun orang tertentu. Hanya melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas sicalon debitur selama berhubungan dengan yang bersangkutan.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian

Sumber dana adalah hal yang paling penting bagi bank untuk meningkatkan jumlah kredit yang akan di salurkan kepada masyarakat. Dalam memberikan kredit, sektor perbankan sangat memerlukan ketersediaan dana. Semakin banyak dana bank, maka semakin besar peluang bank menjalankan fungsinya. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2012:59). Dendawijaya (2009:49) mengungkapkan dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

Menurut Arthesa (2006:63) terdapat 3 macam sumber dana langsung dari masyarakat yaitu: rekening tabungan (*saving deposit*), rekening simpanan berjangka (*time deposit*), dan rekening giro (*demand deposit*). Selain itu terdapat pula sumber dana lain yang bersifat tidak langsung atau berupa pengendapan dana bank yang didapatkan melalui pemberian jasa bank (*fee based income*).

a) Tabungan

Tabungan adalah jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan melalui syarat – syarat tertentu, serta dapat dilakukan setiap saat melalui kantor bank, *Automatic Teller Machine* (ATM), dan kartu debit.

b) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka atau dikenal dengan deposito merupakan simpanan masyarakat dimana penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati nasabah dengan pihak bank.

c) Rekening Giro

Rekening giro adalah jenis simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek untuk penarikan tunai atau bilyet untuk pemindahbukuan antar rekening.

4. Modal

a. Pengertian

Bagi masyarakat yang berniat menyimpan dananya di bank posisi modal bank sangatlah penting. Dengan adanya setoran modal dari pemegang saham maka masyarakat akan percaya untuk menyetor dananya. Modal merupakan jumlah total dari dua sumber utama ekuitas saham, yaitu modal disetor dan laba ditahan, (Warren, Reeve dan Philip, 2005:5). Permodalan menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen

bank dalam mengidentifikasi, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Prastiyaningtyas, 2010). Kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar apabila bank tersebut memiliki modal yang cukup sehingga pada saat-saat kritis, bank tetap dalam posisi aman karena memiliki cadangan modal di Bank Indonesia.

Berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, bahwa setiap bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan adanya perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan dalam periode waktu yang digunakan. Penelitian ini menggunakan periode waktu 1998 sampai dengan 2000. Penelitian ini berbeda dalam variabel independen penelitian yang digunakan. Variabel independen penelitian ini adalah penyaluran kredit, DPK dan modal. Sedangkan persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu ialah menganalisis tingkat kinerja perusahaan perbankan.

C. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh penyaluran kredit terhadap aset

Salah satu fungsi kredit yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank tersebut sebagai balas jasa. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank (Kasmir, 2004:100).

Sehingga dapat disimpulkan penyaluran kredit memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap aset.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap aset

Keuntungan utama bisnis bank berasal dari sumber – sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Pengalokasian dana dapat dilakukan untuk penyaluran kredit dan membelikan berbagai macam aset yang dianggap menguntungkan bank (Kasmir, 2004:95).

Dengan demikian lembaga keuangan (bank) sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban pinjaman menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai dengan keinginan penabung (Martono, 2010:3).

Sehingga dapat disimpulkan DPK memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap aset

3. Pengaruh modal terhadap aset

Modal merupakan indikator terhadap kemampuan bank dalam menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko (Dendawijaya, 2003:122).

Resiko atas kerugian yang mungkin timbul tersebut diukur dari jumlah aset yang dimiliki bank. Oleh karena itu kondisi suatu bank digolongkan parah apabila kecukupan modalnya tidak mampu lagi memikul resiko kerugian yang nyata atau disebut sangat rendah (Soehandjono, 2002:86).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal memiliki hubungan positif terhadap aset.

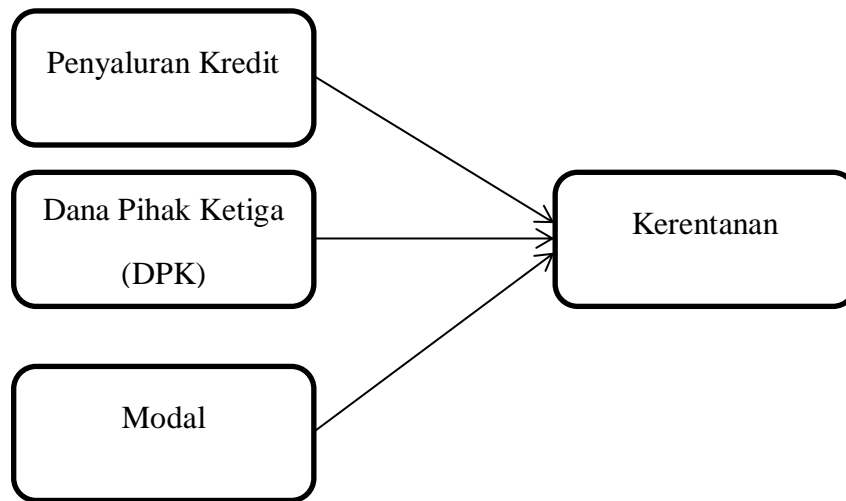
Dari uraian di atas dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka yang menjadi variabel-variabel di dalam penelitian ini adalah variabel penyaluran kredit, DPK, dan modal sebagai variabel independen dan aset sebagai variabel dependen. Sehingga kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti/Judul | Variabel Penelitian & Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|--|
| 1. | Vina Amalia (2016), “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas (ROA) (Studi Kasus pada BUSN Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)” | Dependen: Profitabilitas (ROA) Independen : Dana Pihak Ketiga Dan Penyaluran Kredit Metode : Analisis jalur (path analysis) | DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Penyaluran Kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) |
| 2. | 1. Rifqi Zul Fahmi, 2. Herman Sjahrudin, 3. Niken Probondani Astuti, 4. A. Muh. Syakhrun (2016) “Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan” | Dependen : Profitabilitas Independen : Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Metode : Analisis Regresi Linear berganda | Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan Penyaluran Kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas pada 4 Bank Persero BUMN periode penelitian 2011-2014. |
| 3. | Fahrizal Adam, Cholifah, Enny Istanti (2017) “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Jumlah Kredit Dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Sidoarjo Unit Sidoarjo Kota Periode 2011-2015 | Dependen : profitabilitas Independen : dana pihak ketiga, jumlah kredit dan kredit bermasalah Analisis regresi linier berganda | DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Jumlah kredit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. kredit bermasalah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas |
| 4. | Ade Firmansyah (2013) “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, Dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank (Studi Kasus Pada Bank Persero Periode 2009 - 2012)” | Dependen : Profitabilitas Independen : DPK, Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, Dan Efisiensi Operasi Analisis Regresi Linier Berganda | DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA |
| 5. | Ni Luh Sri Septiarini, I Wayan Ramantha (2014) “Pengaruh Rasio Kecukupan Modal Dan Rasio Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Dengan Moderasi Rasio Kredit Bermasalah” | Dependen : profitabilitas (ROA) Indenden : kecukupan modal dan rasio penyaluran kredit (LDR) Variabel moderasi : rasio kredit bermasalah Analisis Regresi Linear Berganda | Kecukupan modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Penyaluran kredit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Kredit bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Kredit bermasalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara rasio Kecukupan modal dengan profitabilitas Kredit bermasalah berpengaruh positif dan Signifikan terhadap hubungan antara rasio |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | | penyaluran kredit dengan profitabilitas. |
| 6. | Yoli Lara Sukma (2013) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)” | <p>Dependen : Profitabilitas</p> <p>Independen : Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal Dan Risiko Kredit</p> <p>Analisis Regresi Linear Berganda</p> | <p>DPK tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan.</p> <p>Kecukupan modal yang diukur dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap profitabilitas</p> <p>Risiko Kredit yang diukur dengan Non Performing Loan berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan, yang berarti semakin tinggi Non Performing Loan maka profitabilitas akan semakin rendah.</p> |
| 7. | Made Ria Anggreni, I Made Sadha Suardhika (2014) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit Dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas” | <p>Dependen : Profitabilitas</p> <p>Independen : Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit Dan Suku Bunga Kredit</p> <p>Analisis regresi linear berganda</p> | <p>DPK berpengaruh positif terhadap profitabilitas</p> <p>Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas</p> <p>NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas</p> <p>Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas</p> |
| 8. | Riong Walda Panjaitan (2015) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Penyaluran Kredit Terhadap Return On Asset (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar Di Busa Efek Indonesia Periode 2010-2014)” | <p>Dependen : Return On Asset</p> <p>Independen : Dana Pihak Ketiga Dan Penyaluran Kredit</p> <p>Analisis jalur (path analysis)</p> | <p>DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA</p> <p>Penyaluran kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA</p> |
| 9. | Ni Made Elin Sukmawati, Ida Bagus Anom, Purbawangsa (2016) “Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan Kredit, Risiko Kredit, Likuiditas, Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Profitabilitas” | <p>Dependen : profitabilitas</p> <p>Independen : DPK, Kredit, Risiko Kredit, likuiditas dan kondisi ekonomi</p> <p>Analisis Regresi Linear Berganda</p> | <p>Dana pihak ketiga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas</p> <p>Pertumbuhan kredit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas</p> <p>Risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas</p> <p>Likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas</p> <p>Kondisi ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas</p> |
| 10. | Eirene Adhitya Andrayani (2018) “Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Efisiensi Operasional, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Konvensional Di Indonesia” | <p>Dependen : Profitabilitas</p> <p>Independen : Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Efisiensi Operasional, Dan Likuiditas</p> | <p>Kecukupan Modal tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas</p> <p>Risiko Kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas</p> <p>Efisiensi Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas</p> <p>Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas</p> |

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1.
Gambar Skema Kerangka Pikir

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mulai dari latar belakang hingga pemaparan landasan teori, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut:

1. Kredit

H₀: Diduga Kredit tidak dapat ditolak dan berpengaruh secara signifikan terhadap kerentanan pada BPD (Bank Pembangunan Daerah) di Indonesia periode krisis Asia 1998.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

H₀: Diduga DPK tidak dapat ditolak dan berpengaruh secara signifikan terhadap kerentanan pada BPD (Bank Pembangunan Daerah) di Indonesia periode krisis Asia 1998

3. Modal

H0: Diduga Modal tidak dapat ditolak dan berpengaruh secara signifikan terhadap kerentanan pada BPD (Bank Pembangunan Daerah) di Indonesia periode krisis Asia 1998